



TANYA JAWAB **Memahami** **Krisis Keuangan Global** **Bagaimana Pemerintah Mengantisipasinya**





TIM PENYUSUN BUKU

MEMAHAMI KRISIS KEUANGAN GLOBAL
Bagaimana Harus Bersikap

Pengarah: Menteri Komunikasi dan Informatika, Sekretaris Jenderal Departemen Komunikasi dan Informatika. **Penanggung jawab:** Kepala Badan Informasi Publik. **Ketua Pelaksana:** Kepala Pusat Informasi Perekonomian. **Sekretaris:** Selamattha Sembiring **Anggota:** Sekretaris Badan Informasi Publik, Kepala Pusat Informasi Polhukam, Kepala Pusat Informasi Kesejahteraan Rakyat, Kepala Pusat Pengelolaan Pendapat Umum, Kepala Pusat Pelayanan Informasi.

Narasumber: Prof. Mudrajat Kuncoro, PhD, A. Tony Prasetiantono. **Pengumpulan Data:** Dewi Rahmarini, Farida D. Maharani, Dewi Yuliana, Muhammad Azhar, Fouri Gesang Sholeh, Elvira Inda Sari, Karina Listya, Harry Noor Sukarna, Frans Hendra S.S, Jojo Rahardjo, Laode Insan, Heri Rubiyanto, Deny Gumbira. **Pengolahan Data:** Selamattha Sembiring. **Perlengkapan:** Yoserizal, Imron, Haji Anim, Taufan. **Desain dan Tata Letak:** Farida Dewi, MT Hidayat. **Editor:** Suprawoto, Sukemi, Son Kuswadi.



TANYA
JAWAB

MEMAHAMI KRISIS KEUANGAN GLOBAL



TANYA JAWAB

MEMAHAMI KRISIS KEUANGAN GLOBAL

BAGAIMANA PEMERINTAH MENGANTISIPASINYA



Situasi dan arah pasar keuangan global belum juga menentu. Satu demi satu institusi finansial besar masih terus bertumbangan. Efek domino krisis kian terasa kental. Itu pula yang terjadi dengan bursa saham Indonesia, sehingga harus diambil langkah untuk menutup sementara (menyuspensi) perdagangan saham. Dalam kurun waktu yang sama, nilai tukar rupiah juga mengalami depresiasi.

Bangkrutnya sejumlah lembaga keuangan multinasional yang beroperasi di seluruh dunia jelas akan memperketat likuiditas atau jumlah uang yang beredar secara global. Lembaga tersebut perlu melakukan konsolidasi, mengeliminasi kerugian, dan menyehatkan diri terlebih dahulu. Mereka pasti menarik terlebih dahulu dana-dana yang ditempatkan di pasar negara berkembang, seperti Indonesia dan negara lainnya.

Itulah antara lain dampak langsung krisis keuangan

global yang bisa dirasakan saat ini. Sementara pelambatan laju pertumbuhan ekonomi global, regional, maupun domestik sudah tergambar di depan mata. Lalu bagaimana dengan posisi Indonesia?

Buku ini berisi tanya-jawab tentang krisis keuangan global secara umum serta pengaruhnya terhadap kondisi perekonomian Indonesia. Diharapkan melalui buku ini kita dapat menyikapi situasi saat itu. Sekaligus bisa bersikap bijaksana dalam berpikir dan bertindak dengan rasional, karena kepanikan dan tindakan irasional hanya akan memperkeruh suasana dan merugikan semua.

Sepuluh arahan atau direktif Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan beberapa kebijakan yang telah diambil pemerintah, merupakan bagian dari upaya dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan negatif terhadap perekonomian Indonesia dari situasi krisis keuangan

SAMBUTAN MENTERI



global yang terjadi saat ini.

Buku ini disusun dan disiapkan dalam bentuk tanya jawab untuk memudahkan dalam memahami sekaligus mensosialisasikan kepada masyarakat tentang krisis keuangan global yang sesungguhnya, melalui pemaparan gambaran utuh tentang langkah-langkah yang diambil pemerintah.

Terima kasih kepada narasumber dan tim penyusun buku yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan semua bahan hingga terbitnya buku ini. Semoga buku ini bermanfaat. Kritik dan saran untuk penyempurnaan buku ini sangat dinantikan.

Jakarta, Oktober 2008
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
RI

MOHAMMAD NUH

DAFTAR ISI

SAMBUTAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I	
LATAR BELAKANG KRISIS KEUANGAN AMERIKA SERIKAT	1
BAB II	
KEBIJAKAN BERBAGAI NEGARA ATASI DAMPAK KRISIS KEUANGAN GLOBAL	17
BAB III	
KONDISI PEREKONOMIAN INDONESIA	29
BAB IV	
DAMPAK KRISIS KEUANGAN GLOBAL DI INDONESIA	41
BAB V	
KEBIJAKAN INDONESIA MENGHADAPI DAMPAK KRISIS GLOBAL	45

DAFTAR ISTILAH





TANYA
JAWAB

MEMAHAMI KRISIS KEUANGAN GLOBAL

1



BAB I LATAR BELAKANG KRISIS KEUANGAN AMERIKA SERIKAT

1. Apa penyebab krisis ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat?

Krisis ekonomi yang melanda Amerika Serikat terjadi akibat macetnya kredit properti (*subprime mortgage*), semacam kredit kepemilikan rumah (KPR) di Indonesia. Hal tersebut diikuti dengan ambuknya lembaga-lembaga keuangan di Amerika Serikat.

Sebelum krisis, Alan Greenspan, selaku Ketua **The Fed**, bank sentral Amerika Serikat, menerapkan suku bunga rendah pada kisaran 1 hingga 2 persen. Yang menjadi masalah, lembaga keuangan pemberi kredit pemilikan rumah (KPR) di Negeri Paman Sam itu banyak menyalurkan kredit kepada penduduk yang sebenarnya tidak layak mendapatkan pembiayaan.

Kemudahan pemberian kredit terjadi justru ketika harga properti di AS sedang naik. Pasar properti yang bergairah membuat spekulasi di sektor ini meningkat. Kredit properti memberi suku bunga tetap selama tiga tahun yang membuat banyak orang membeli rumah dan berharap bisa menjual dalam tiga tahun sebelum suku bunga disesuaikan.

Sementara, untuk memberikan kredit, lembaga-lembaga itu umumnya meminjam dana jangka pendek dari

pihak lain, termasuk lembaga keuangan. Perusahaan pembiayaan kredit rumah juga menjual surat utang (mirip *subprime mortgage securities*) kepada lembaga-lembaga investasi dan investor di berbagai negara.

Beberapa perusahaan pembiayaan kredit rumah, contohnya **Fannie Mae & Freddie**

Kerugian Mayor Sektor Sub-Primer di Amerika Serikat (per Juni 2008)	
Perusahaan	Kerugian
Citigroup	\$40.7bn
UBS	\$38bn
Merrill Lynch	\$31.7bn
HSBC	\$15.6bn
Bank of America	\$14.9bn
Morgan Stanley	\$12.6bn
Royal Bank of Scotland	\$12bn
JP Morgan Chase	\$9.7bn
Washington Mutual	\$8.3bn
Deutsche Bank	\$7.5bn
Wachovia	\$7.3bn
Credit Agricole	\$6.6bn
Credit Suisse	\$6.3bn
Mizuho Financial	\$5.5bn
Bear Stearns	\$3.2bn
Barclays	\$3.2bn

keterangan: bn = billion/miliar

sumber: www.bbc.com

Mac mendapatkan dana dengan menjual surat utang ke bank komersial, bank devisa, atau perusahaan asuransi, diantaranya **Lehman Brothers** atau **AIG**.

Ketika terjadi kredit macet di sektor properti, surat utang yang ditopang oleh jaminan debitur berkemampuan pembayaran KPR rendah itu, mengalami penurunan harga, sehingga mempengaruhi likuiditas keuangan pasar modal dan sistem perbankan.

2. Mengapa perusahaan tersebut berani memberikan KPR?

Perusahaan-perusahaan tersebut berani memberikan KPR karena memiliki skema menyita dan menjual kembali rumah seandainya terjadi gagal bayar.

Kenyataan menunjukkan bahwa banyak pemilik rumah di Amerika yang gagal memenuhi kewajiban kredit KPR. Akibatnya, perusahaan-perusahaan pemberi KPR menghadapi kredit macet dan tidak mampu membayar kembali utangnya.

Di sisi lain, banyak rumah yang disita oleh bank (*foreclosed*) dan saat dijual ternyata harga pasar properti sudah turun drastis. Akibatnya, bank-bank di Amerika Serikat, Eropa, Asia (terutama Jepang), Australia, dan

lembaga investasi teratas di dunia yang memiliki *subprime mortgage securities* ikut terkena dampaknya.

Lembaga tersebut mengalami kerugian hingga miliaran dolar, sementara bank-bank dan lembaga investasi tersebut tercatat di bursa saham. Kondisi ini menyebabkan kejatuhan pasar saham di seluruh dunia.

3. Apa dampak subprime mortgage di Amerika Serikat?

Pada saat suku bunga KPR berubah pada akhir tahun kedua menjadi *adjustable rate* (suku bunga penyesuaian/dinaikkan), kewajiban pembayaran bulanan konsumen meningkat secara drastis. Dilaporkan bahwa di Amerika terjadi peningkatan suku bunga pinjaman dari 1-2 persen menjadi 5 persen. Hal tersebut menyebabkan konsumen yang memang kurang layak kredit mengalami kesulitan membayar cicilan KPR dan banyak kasus gagal bayar terjadi.



Penurunan pertumbuhan sektor perumahan sejak awal 2006 yang ditandai peningkatan harga rumah dan suku bunga kredit properti juga dipengaruhi oleh *predatory lending practice* (kecurangan dalam penyaluran kredit) oleh penyalur kredit properti.

Banyak konsumen yang tidak layak menerima kredit dibujuk dengan bermacam taktik. Harapannya, jika terjadi gagal bayar, maka agunan akan dieksekusi dan penyalur KPR mendapat keuntungan dari penjualan rumah kembali.

Para lembaga penyalur kredit properti bersaing untuk mendapat konsumen melalui penawaran produk kredit properti yang cukup bervariasi tanpa mengenal secara mendalam karakteristik risiko serta melunakkan ketentuan mendapatkan kredit properti.

Di sisi lain, ketika kredit perumahan disekuritisasi menjadi produk instrumen investasi derivatif bertingkat, maka gelembung likuiditas makin besar. Produk sekuritas juga diperjualbelikan antar lembaga keuangan di



pasar modal sehingga letusan gelembung likuiditas turut mempengaruhi banyak lembaga keuangan dari berbagai penjuru dunia.

4. Bagaimana akibat krisis keuangan dan langkah yang diambil Pemerintah Amerika Serikat?

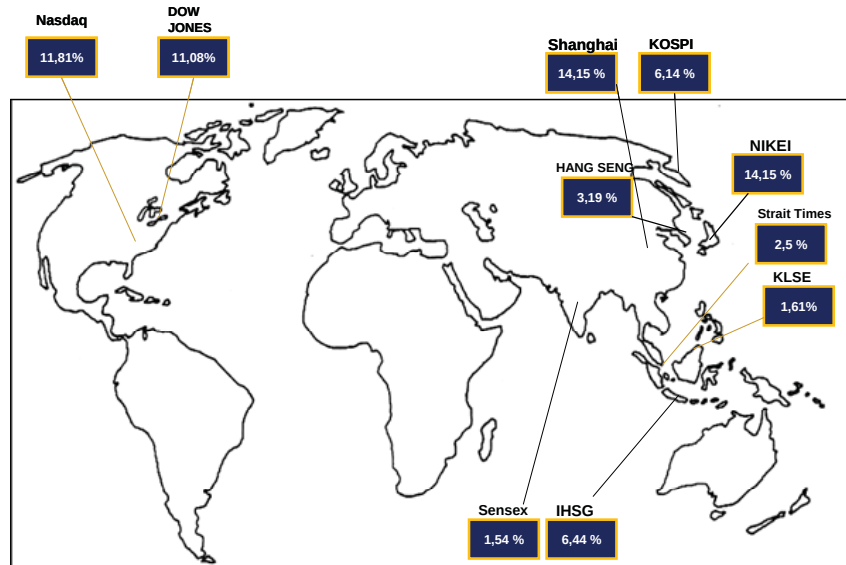
Setelah kondisi perekonomian Amerika Serikat semakin hari semakin tidak menentu, akhirnya pada 7 September 2008, Departemen Keuangan Amerika Serikat mengambil alih dua perusahaan pembiayaan perumahan terbesar: **Fannie Mae** dan **Freddie Mac**.

Pada tanggal 15 September 2008, Bank Sentral AS (**The Fed**) menyuntikkan USD 70 miliar ke pasar. Dalam waktu yang hampir bersamaan, kondisi tersebut juga diikuti dengan tumbangannya bursa-bursa di kawasan Eropa. Kemudian Bank Sentral AS mengucurkan pinjaman 85 miliar dollar AS ke **American International Group** dan mengambil alih 80 persen saham perusahaan asuransi tersebut.

Tanggal 18 September 2008, Pemerintah AS meminta Kongres menyetujui paket penyelamatan ekonomi



Kinerja Bursa Dunia 14 Oktober 2008



Sumber: Bloomberg diolah Kuncoro, 2008

berupa dana talangan pemerintah (*bailout*) USD 700 miliar. Presiden George Bush menyatakan perekonomian AS dalam bahaya jika Kongres tidak menyetujui rencana *bail-out*.

Pada 26 September 2008, **Washington Mutual**, bank terbesar di AS kolaps dan sebagian asetnya dibeli oleh **JPMorgan Chase**. Kemudian, tanggal 29 September 2008, Kongres AS menolak rencana *bailout*. Indeks **Dow Jones** pun merosot 778 poin, yang merupakan terbesar dalam sejarah.

Pada tanggal 3 Oktober 2008, Kongres akhirnya menyetujui *bail-out*. Presiden Bush menandatangani Undang-undang Stabilisasi Ekonomi Darurat 2008, namun pasar keuangan dan bursa saham dunia masih tetap bergolak.

5. Apa dampak krisis keuangan Amerika Serikat terhadap perkembangan perekonomian global?

Secara umum dampak krisis keuangan AS terhadap perekonomian global dapat dikategorikan dalam dua jenis, yaitu dampak langsung dan tak langsung.

6. Apa dampak langsung krisis keuangan AS?

- Kerugian bagi bank berskala global, terutama di kawasan Amerika Serikat dan Eropa. Total kerugian diperkirakan mendekati USD 1.000 miliar (IMF, 2008). Perusahaan **Merril Lynch** mencatat kerugian USD 52,2 miliar, **Citigroup** USD 55,1 miliar, **UBS AG** USD 44,2 miliar, **HSBC** USD 27,4 miliar.
- Jatuhnya lima lembaga keuangan terbesar, yaitu **Bear Stearns**, **Lehman Brothers**, **Fannie Mae** dan **Freddie Mac**, serta **AIG**.
- Skala kerugian diperkirakan mencapai tiga kali lipat dari dampak kerugian krisis finansial di Asia pada tahun 1997-1998.



7. Apa dampak tidak langsung krisis subprime mortgage tersebut?

- Mengeringnya likuiditas di pasar modal dan perbankan global yang akan diiringi dengan penarikan dana, khususnya dari *emerging markets*, baik dana dalam bentuk portofolio saham, obligasi maupun pinjaman dalam valuta asing. Jika hal tersebut terjadi, maka pendanaan dalam valuta asing akan sangat sulit didapat dan menjadi mahal.

Bahkan, berbagai bank global telah mengubah *quotation* bukan lagi dengan *LIBOR based* (*London Interbank Offered Rate*/kurs referensi harian dari suku bunga yang ditawarkan dalam pemberian pinjaman tanpa jaminan oleh suatu bank kepada bank lainnya di Pasar Uang London), namun dengan *cost of fund* yang ditentukan oleh perusahaan itu sendiri.

Sebagai contoh, Perusahaan **General Electric** dengan rating AAA dapat mencari tambahan modal tetapi harus menawarkan saham preferen dengan mem-



bayar *dividend yield* 10 persen.

- Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan di tahun 2008.

Pertumbuhan ekonomi AS sebesar 2,0 persen di tahun 2007 diperkirakan oleh **The Fed** akan mengalami perlambatan menjadi 1,3 persen di tahun 2008.

Sementara itu, tingkat inflasi AS yang mencapai 2,9 persen pada tahun 2007 diperkirakan meningkat menjadi 4,0 persen di tahun 2008 dan inflasi di Eropa diperkirakan meningkat dari 2,1 persen menjadi 3,6 persen.

Dampaknya, hampir seluruh negara di dunia akan mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. China yang merupakan salah satu kekuatan ekonomi dunia juga merasakan dampaknya. Pertumbuhan ekonomi negara tersebut diperkirakan akan melambat dari 11,9 persen di tahun 2007 menjadi 10 persen di 2008.

- Penurunan permintaan impor akan terjadi akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Kondisi ini mendorong penurunan harga komoditas global, sehingga akan menekan perekonomian

negara-negara berkembang terutama yang berbasis pada ekspor komoditas.

Contohnya, dalam beberapa bulan terakhir dua komoditi ekspor utama Indonesia yaitu CPO (*crude palm oil*) di Pasar **Rotterdam** mengalami penurunan harga dari USD1,207 per metrik ton di bulan Juni 2008, menjadi USD705 per metrik ton di bulan September 2008.

Sementara, batubara (*coal*) di Pasar **US Spot Big Sandy** juga mengalami penurunan harga dari USD133,5 per *short ton* pada Juni 2008 menjadi USD112,5 per *short ton* pada September 2008.

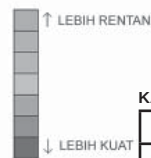
- Dengan indikasi penurunan volume maupun nilai ekspor ke depan, sementara laju impor belum dapat diredam secara signifikan, maka dapat terjadi defisit perdagangan yang semakin melebar dalam beberapa waktu mendatang.

8. Negara mana saja yang rentan terhadap krisis keuangan AS?

Saat ini hampir semua negara-negara di dunia menganut sistem pasar bebas. Semua negara terkait satu sama lainnya dalam ekonomi global yang terintegrasi.

AMERIKA SERIKAT

DAMPAK KRISIS	AMERIKA
Bank / Institusi Keuangan / Korporasi Bangkrut	✓
Inflasi meningkat	✓
Pertumbuhan Ekonomi berkurang	✓
Indeks Bursa Runtuh	✓



KAWASAN EROPA

DAMPAK KRISIS	ISLANDIA	RUSIA	BELANDA	INGGRIS	PERANCIS	JERMAN
Bank / Institusi Keuangan / Korporasi Bangkrut	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bank / Institusi Keuangan / Korporasi Merugi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Inflasi meningkat	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pertumbuhan Ekonomi berkurang	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Indeks Bursa Saham Runtuh	✓	✓	✓	✓	✓	✓

DAMPAK KRISIS KEUANGAN AS DI BEBERAPA KAWASAN

Aliran dana bebas keluar masuk dari satu negara ke negara lainnya. Oleh karena itu, semua berisiko terimbas krisis yang terjadi. Akan tetapi, dampak krisis ekonomi tentu saja berbeda di setiap negara karena adanya perbedaan regulasi moneter dari satu pemerintah ke pemerintah lainnya.

Negara yang paling rentan adalah negara yang fundamental ekonomi domestiknya tidak kuat. Fundamental ekonomi sebuah negara sangat ditentukan beberapa

KAWASAN ASIA-PASIFIK

DAMPAK KRISIS	CINA	TAI- WAN	SINGA- PURA	PHILIPI- NA	JEPANG	AUS- TRALIA
Bank / Institusi Keuangan / Korporasi Bangkrut			√			
Bank / Institusi Keuangan / Korporasi Merugi	√	√	√	√	√	√
Inflasi meningkat	√	√	√	√	√	√
Pertumbuhan Ekonomi berkurang	√	√	√	√	√	√
Indeks Bursa Runtuh	√	√	√	√	√	√

faktor. Salah satunya adalah kebijakan bank sentral yang pada dasarnya memiliki kewajiban untuk mengatur kebijakan moneter guna mengatasi gelembung-gelembung ekonomi seperti gelembung *subprime*.

Salah satu negara di kawasan Eropa yang saat ini terkena dampak krisis finansial AS cukup parah adalah Islandia. Sebelum krisis, Islandia berada di tingkat ke 4 negara termakmur dengan GNP per kapita sekitar USD60,000 (IMF, 2008).

Setelah krisis, Krona, mata uang Islandia terdepresiasi hingga 30 persen. Sementara itu, Bank Sentral mereka tidak mampu menjamin simpanan masyarakat karena utang luar negeri perbankan swasta yang besarnya mencapai 11 kali lipat PDB negara itu.

9. Bagaimana kondisi perdagangan saham dunia akibat krisis keuangan AS?

Pergerakan bursa saham di beberapa negara terpengaruh krisis keuangan Amerika. Dari mulai awal bulan Oktober 2008, dalam beberapa hari nilai indeks bursa saham di banyak negara banyak terkoreksi atau menurun. Kondisi di beberapa negara tersebut bisa dilihat berikut ini:

KONDISI PERDAGANGAN BEBERAPA BURSA SAHAM DI DUNIA PASCA KRISIS KEUANGAN AMERIKA SERIKAT

Indeks	3-Okt-08	6-Okt-08	7-Okt-08	8-Okt-08
ASIA TENGGARA				
Jakarta Composite Index (IHSG)	Libur	1648.74	1619.72	1451.67
Kuala Lumpur Composite Index	1016.7	996.84	997.23	970.19
Strait Times Index (Singapura)	2297.12	2168.32	2177.55	2033.61
SET (Bangkok)	590.05	551.8	528.71	492.34
PSEi (Manila)	2566.21	2499.53	2424.19	2307.74
ASIA - PASIFIK				
Nikkei-225 (Tokyo)	10938.14	10473.09	10155.9	9203.32
Hang Seng (Hong Kong)	17682.4	16803.76	Libur	15431.73
Kospi (Seoul)	Libur	1358.75	1366.1	1286.69
Shanghai	Libur	2173.74	2157.84	2092.22
Taipei	5742.23	5505.7	5524.66	5206.4
BSE Sensex-30 (Mumbai)	12526.32	11801.7	11695.24	11328.36
All Ordinary	4702.8	4544.7	4597.9	4369.8
NZX 50 (Wellington)	3151.54	3048.38	3004.19	2948.31
DJIA	10325.38	9955.5	9447.11	9258.1



S&P 500 Index	1099.23	1056.89	996.23	984.94
Nasdaq Composite Index (AS)	1947.39	1862.96	1754.88	1740.33
S&P/TSX Comp (Toronto)	10803.35	10230.43	9829.55	10056.31
Meksiko Bolsa Index	22989.5	21749.13	20884.74	20678.97
Brazil Bovespa Index	44517.32	42100.79	40139.85	38593.54
EROPA				
FTSE-100 (London)	4980.25	4589.19	4605.22	4366.69
CAC-40 (Paris)	4080.75	3711.98	3732.22	3496.89
DAX Index (Frankfurt)	5797.03	5387.01	5326.63	5013.62
IBEX-35 (Spanyol)	11418.5	10726	10862	10297.6
S&P/MIB Index (Milan)	25911	23776	23622	22279.79
AEX-Index (Amsterdam)	344.02	312.56	309.44	285.66
OMX-30 (Stockholm)	780.39	723.91	707.21	663.69
Micex Index (Moskow)	924.55	752	744.76	637.87
TIMUR TENGAH - AFRIKA				
DFM General Index (Dubai)	Libur	3551.79	3369.15	3085.02
FTSE/JSE Top-40 (Johannesburg)	20523.64	18953.4	19495.3	18958.88

Sumber : diolah dari Bloomberg

10. Apa dampak krisis keuangan Amerika terhadap kawasan Asia Pasifik?

Dampak bisa muncul melalui banyak saluran, bisa melalui pasar uang (*financial market*), dan bisa lewat anjloknya ekspor negara-negara Asia. Contoh paling dekat adalah perekonomian Singapura saat ini. Perekonomian Singapura sangat berkaitan dengan Amerika Serikat.

Singapura banyak mengekspor produknya ke Amerika. Jadi, setiap kali ekonomi Amerika anjlok sampai dengan 2 persen, maka ekonomi Singapura ikut terseret turun 2-3 persen.

Laporan kuartal IV-2007, ekonomi Singapura yang biasanya tumbuh sekitar 9 persen, anjlok ke 6 persen. Itu menunjukkan kemerosotan ekonomi Amerika berdampak terhadap negara-negara Asia.

Bahkan, ekonomi Cina, yang memiliki kekebalan terhadap resesi negara lain, juga terkena imbas. Indeks **Shanghai** anjlok dan mulai mengantisipasi penurunan ekspor ke AS dengan mengalihkan ke pasar regional, termasuk Indonesia. Upaya untuk mempertahankan pertumbuhan ekspor itu harus diwaspadai karena akan membuat banjirnya produk Cina ke Indonesia.



BAB II KEBIJAKAN BERBAGAI NEGARA ATASI KRISIS KEUANGAN GLOBAL

1. Apa yang dilakukan Pemerintah Amerika Serikat untuk keluar dari krisis?

Beberapa langkah kebijakan yang diambil Pemerintah AS diantaranya memberikan dana talangan (*bailout*) kepada korporasi yang bangkrut sebesar USD700 miliar. Dana talangan ini disediakan untuk menyelamatkan institusi keuangan dan perbankan demi mencegah krisis ekonomi yang berkepanjangan. *Bailout* dilakukan dalam bentuk pemerintah membeli surat utang *subprime mortgage* yang macet, yang dipegang oleh investor.

Langkah berikutnya, bank sentral menurunkan suku bunga 0,5 persen menjadi 1,5 persen, agar dana-dana masyarakat tidak mengendap di bank dan bisa menggerakkan sektor riil.

Selain itu, pemerintah juga berjanji membeli surat berharga jangka pendek USD900 miliar. Bank Sentral Amerika (**Federal Reserve**) mengumumkan rencana radikal untuk menutup sejumlah besar utang jangka pendek yang bertujuan menciptakan terobosan dalam



kemacetan kredit yang mengakibatkan krisis finansial global.

2. Apa yang dilakukan negara di kawasan Eropa dalam mengatasi krisis?

Beberapa negara di kawasan Eropa melakukan beberapa langkah kebijakan moneter. Otoritas moneter Inggris menurunkan suku bunga 0,5 persen menjadi 4,5 persen, penurunan terbesar dalam tujuh tahun terakhir, serta merekapitalisasi **Santander, Barclays, HBOS, HSBC, Lloyds TSB, Nationwide Building Society, Royal Bank of Scotland**, dan **Standard Chartered**.

Pemerintah Inggris juga menjamin utang berupa surat berharga berjangka pendek dengan nilai USD250 miliar untuk jangka menengah, selain itu **Bank of England** menyediakan 200 miliar poundsterling untuk pinjaman jangka pendek perbankan.

Pemerintah Inggris bertemu dengan bank-bank untuk membicarakan suntikan dana seperti **Royal Bank of Scotland, Lloyds TSB**, dan **Barclays** yang memer-



KAWASAN EROPA

PENANGGULANGAN KRISIS	NAMA NEGARA
Menurunkan Suku Bunga	Inggris, Uni Eropa, Kanada, Swiss, Swedia
Menasionalisasi Perusahaan	Inggris
Mengambil alih untuk penyehatan	Islandia
Pemberian Dana Talangan (Bailout)	Belgia, Jerman, Inggris
Penutupan Bursa	Rusia
Penutupan Bursa	Rusia
Meningkatkan Jaminan Deposito	Inggris, Jerman, Irlandia, Austria, Denmark, Yunani, Bulgaria, Perancis, Italia, Belanda, Portugal, Slovenia, Spanyol dan Swedia, Rusia, Ukraina dan Rumania
Melarang Short Selling	Inggris, Jerman, Italia, Irlandia, Perancis dan Swiss

dari berbagai sumber

lukan suntikan dana masing-masing USD26 miliar.

Sementara itu, Pemerintah Islandia, menasionalisasi **Bank Glitnir** yang bangkrut, kemudian memecat Dewan Direksi **Landsbanki**, bank terbesar di negeri tersebut yang mengalami kebangkrutan serta memberikan suntikan dana pada bank-bank bermasalah. Pemerintah Islandia optimistis dalam jangka panjang akan bisa *recovery* karena memiliki potensi cadangan gas alam dan sumber daya manusia yang handal.

Rusia memberikan suntikan dana USD 37 miliar ke bank-bank besar Islandia, demikian juga Swedia turun tangan memberikan suntikan dana sebesar USD 702 juta. Pemerintah Rusia menutup bursa saham sebagai usaha untuk membendung kepanikan investor akibat penurunan indeks saham dan meminjamkan dana sebesar USD37 miliar kepada bank-bank besar.

Pemerintah Rusia juga memberikan suntikan dana 500 miliar Rubel kepada **Sberbank**, 200 miliar rubel pada **VTB** (Bank milik pemerintah). Selain itu juga menyerukan pertemuan G-8 dan juga keterlibatan Cina dalam melakukan upaya bersama Bank Sentral mengatasi krisis

Bersama Pemerintah Belgia dan Luxemburg, Pe-

merintah Belanda memasok dana hingga total 11,2 miliar euro kepada bank asuransi Fortis yang hampir bangkrut.

Presiden Perancis, Nicolas Sarkozy di hadapan kabinet mengatakan negara siap menolong permodalan bank-bank utama di Perancis dan meminta Jepang dan pemimpin G-8 melakukan pertemuan darurat untuk menenangkan krisis.

Sementara itu, para menteri keuangan Uni Eropa segera melakukan pertemuan membahas jumlah simpanan maksimum yang akan mendapatkan jaminan pemerintah di 27 negara anggota Uni Eropa. Diupayakan adanya peningkatan jumlah simpanan yang dijamin Negara. Selain itu melakukan penurunan suku bunga bank sentral Eropa 0,5 persen menjadi 3,75 persen.

3. Apa yang dilakukan negara-negara di kawasan Asia Pasifik untuk menekan dampak krisis?

Untuk mengantisipasi dampak krisis ekonomi yang terjadi, **People's Bank of China (PBOC)** yang merupakan otoritas moneter menurunkan suku bunga dari 7,2 persen menjadi 6,93 persen dan pemerintah berjanji membantu AS dalam mengatasi krisis.

KAWASAN ASIA DAN PASIFIK

PENANGGULANGAN KRISIS	NAMA NEGARA
Menaikkan Suku Bunga	Indonesia
Menurunkan Suku Bunga	Cina, Hongkong, Korea Selatan, Taiwan, Australia, Selandia Baru
Mengambil alih untuk penyehatan	Cina
Pemberian Dana Talangan (Bailout)	Jepang
Membeli Kembali Saham (Buy Back)	Indonesia, Thailand
Insentif bagi Eksportir	Indonesia, Thailand
Penutupan Bursa	Indonesia, Thailand
Meningkatkan Jaminan Deposito	Indonesia, Hongkong, Selandia Baru, Australia.
Melarang Short Selling	Indonesia, Taiwan, Korea, Australia

dari berbagai sumber



Bank Sentral Australia menurunkan suku bunga, terbesar dalam 16 tahun terakhir menjadi 6 persen. Hal itu dilakukan untuk melonggarkan likuiditas yang mulai terasa kurang di sistem perbankan Australia.

Pemerintah Australia juga memberikan jaminan tabungan perorangan dan lembaga keuangan sampai tiga tahun sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan terhadap perbankan di negara ini.

Pemerintah Korea Selatan meminta teknokrat ekonomi untuk menyiapkan rencana-rencana darurat mengantisipasi skenario terburuk dari krisis keuangan AS dan mengusulkan untuk berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Cina dan Jepang untuk menyiapkan rencana darurat.

Pemerintah Korea Selatan juga meminta otoritas perbankan menjamin kebutuhan dana yang diperlukan perusahaan lokal, termasuk kebutuhan akan dolar AS.



TANYA
JAWAB

MEMAHAMI KRISIS KEUANGAN GLOBAL

19

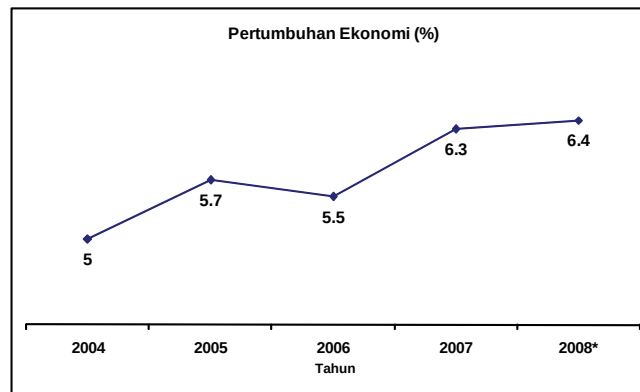


BAGIAN 3 KONDISI PEREKONOMIAN INDONESIA

1. Apakah pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup kondusif untuk menekan dampak krisis AS?

Pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu 2004-2007 semakin baik. Kondisi tersebut dapat dicapai karena didukung oleh stabilitas ekonomi yang cukup terjaga yang diwujudkan melalui sinergi antara kebijakan fiskal, moneter dan sektor keuangan.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat dari 5,5



persen di tahun 2006 menjadi 6,3 persen pada 2008. Angka yang tertinggi sejak krisis tahun 1998.

Pertumbuhan itu didorong pertumbuhan konsumsi yang meningkat dari 3,2 persen pada tahun 2006 menjadi 5,0 persen pada tahun 2007, dan diprediksi akan terus meningkat di tahun 2008 dan 2009.

Pembentukan modal tetap bruto yang meningkat tajam dari 2,5 persen di tahun 2006 menjadi 9,2 persen (2007).

Sementara itu pengeluaran pemerintah menurun dari 9,6 persen menjadi 3,9 persen. Pertumbuhan sektor pertanian juga meningkat sedikit dari 3,4 persen (2006) menjadi 3,5 persen (2007).

Pertumbuhan ekonomi domestik saat ini juga tetap kuat di tengah perlambatan perekonomian global.

Tahun	Persentase
2004	5
2005	5.7
2006	5.5
2007	6.3
2008*	6.4

Sumber: Diolah dari berbagai sumber
Ket: * Angka Perkiraan

2. Bagaimana dengan kondisi makro ekonomi Indonesia?

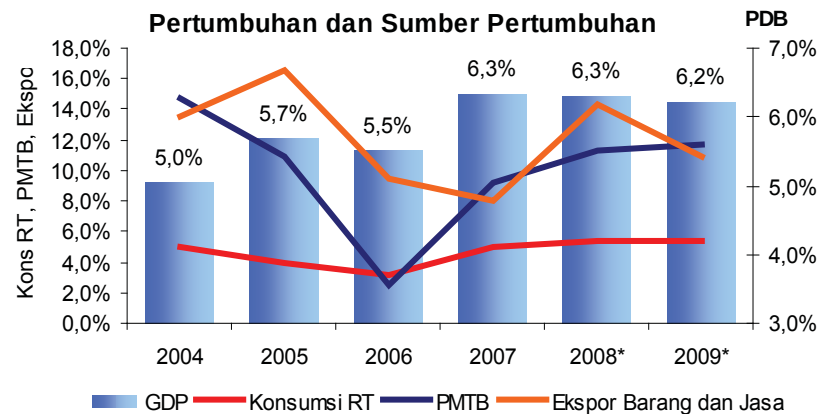
Kondisi ekonomi makro saat ini di Indonesia, cukup membaik sejak tahun 2004. Hal itu ditandai dengan beberapa pencapaian, diantaranya :

- Terkendalnya nilai tukar rupiah terhadap USD
- Pertumbuhan ekonomi yang terus membaik
- Laju inflasi yang relatif terkendali
- Menurunnya suku bunga (BI Rate)
- Penerimaan dalam negeri/pajak terus meningkat

3. Apakah pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin baik?

Kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin membaik. Hal itu ditandai dengan meningkatnya pendapatan riil per kapita dari Rp8.319.000,- pada tahun 2006 menjadi Rp8.725.000,- pada tahun 2007.

Peningkatan itu juga disertai peningkatan kondisi ketenagakerjaan dengan menurunnya tingkat pengang-



guran terbuka dari 10,3 persen atau 10,9 juta orang pada tahun 2006 menjadi 9,1 persen atau 10,0 juta orang pada tahun 2007. Jumlah penduduk miskin menurun 2,1 juta orang sehingga menjadi 37,1 juta orang (16,6 persen).



4. **Apakah pasar modal Indonesia siap menghadapi krisis?**

Pada tahun 2005, terimbas oleh penurunan kegiatan ekonomi dan peningkatan risiko, perkembangan pasar modal melambat. Perkembangan pasar modal kembali meningkat pada tahun 2006, seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi makro yang terlihat dari menurunnya BI rate dan tingkat inflasi.

Pada Tahun 2007, pasar modal mengalami perkembangan yang menggembirakan seiring dengan semakin baiknya indikator ekonomi makro dan iklim investasi.

5. **Bagaimana dengan kondisi investasi di Indonesia?**

Kondisi investasi membaik dengan naiknya peringkat kemudahan berusaha yang dibandingkan dengan tahun 2006 berada pada posisi 133 dari 178 negara menjadi 123 dari 178 negara pada tahun 2007 (*Survey Doing Business* 2008, IFC).

Kasus peledakan bom di tahun antara tahun 2006-2007 menjadi salah satu faktor yang menghambat tumbuhnya iklim investasi di Indonesia. Ada pula beberapa faktor ketidaknyamanan berinvestasi, diantaranya, ak-

si-aksi dan demo buruh yang menuntut perbaikan hidup dengan meminta tunjangan-tunjangan serta masih adanya pungli-pungli yang sering dilakukan oleh para oknum pemerintah dan aparat keamanan.

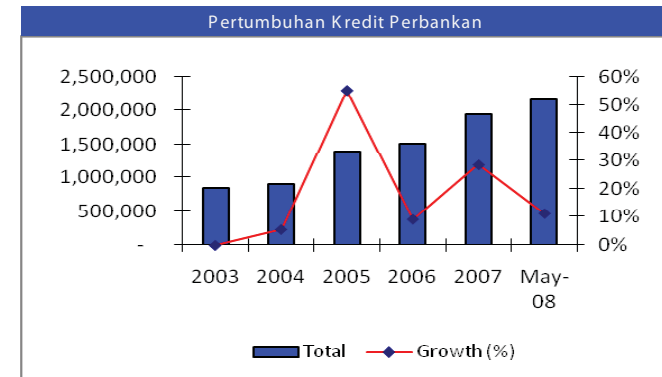
Oleh karena itu, untuk memperbaiki kondisi investasi pemerintah memfokuskan perbaikan kemudahan usaha, diantaranya kemudahan pendaftaran tanah, pembayaran pajak, akses memperoleh kredit, dan pengurangan hambatan perdagangan.

6. **Bagaimana kondisi perbankan Indonesia?**

Kondisi perbankan yang menjadi jantung perekonomian Indonesia saat ini memiliki fundamental yang kuat. Hal itu tercermin dari berbagai faktor seperti rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan*), likuiditas dan permodalan. NPL netto, setelah dikurangi provisi hanya 1.42 persen jauh di bawah batas maksimum 5 persen.

Likuiditas perbankan saat ini juga masih memadai, tercermin dari rasio kredit terhadap dana pihak ketiga (*Loan to Deposit Ratio/LDR*) yang masih dibawah 80 persen.

Ketatnya likuiditas yang terjadi belakangan ini bukan disebabkan oleh kelangkaan likuiditas yang ada di in-

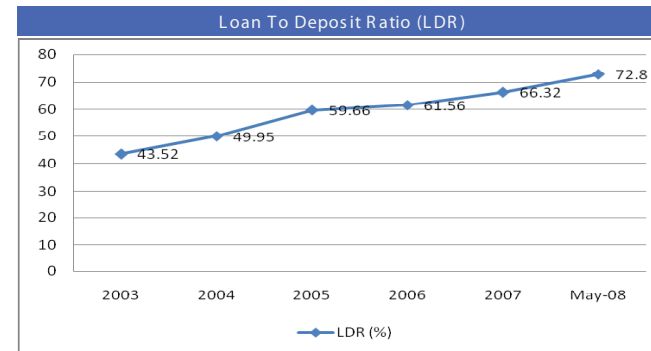


Sumber: Erwin Aksa (2008)

dustri, tetapi lebih karena faktor psikologis dan kepemilikan likuiditas yang tidak merata antarbank.

Permodalan perbankan domestik juga cukup kuat. Ini tercemin dari rasio kecukupan modal yang sebesar 17 persen, jauh di atas angka maksimum 8 persen.

Fundamental yang kuat tersebut akan membuat perbankan tetap optimal melakukan fungsi intermediasi untuk mendorong perekonomian. Laju pertumbuhan



Sumber: Erwin Aksa (2008)

kredit perbankan sangat fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan selama periode 2003-Mei 2008 sekitar 22 persen. LDR perbankan mengalami outlook yang positif dimana Mei 2008 sekitar 72 persen, yang menunjukkan partisipasi perbankan cukup baik kepada sektor riil.

7. *Sejauhmana inflasi dapat dikendalikan?*

Kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai sasa-



ran inflasi yang ditetapkan, yakni 8,0 persen pada tahun 2006 dan 6,5 persen pada tahun 2007. Pada 2006 – 2007, inflasi berhasil dikendalikan pada kisaran 6,6 persen. Hingga akhir maret 2008, laju inflasi mencapai 3,41 persen (y-t-d) dan akan diupayakan mencapai 6,5 persen pada keseluruhan tahun 2008.

Kestabilan tingkat inflasi telah mendorong penurunan tingkat suku bunga Bank Indonesia (BI rate) dari 9,75 persen (2006) menjadi 8,0 persen (2007).

Peningkatan jumlah uang beredar dari Rp297,1 triliun (2006) menjadi Rp379,6 triliun (2007) atau dari 23,9 persen (2006) menjadi 27,8 persen (2007), dan terapresiasinya Rupiah dari Rp9.168 per USD menjadi Rp9.140,- per USD.

8. Apakah neraca perdagangan Indonesia juga meningkat?

Peningkatan surplus neraca transaksi berjalan tercatat dari USD10,6 miliar di tahun 2006 menjadi USD11,0 miliar pada tahun 2007. Peningkatan itu terjadi karena kenaikan ekspor nonmigas sebesar 15,6 persen pada 2007.

Namun, ekspor migas mengalami penurunan dari

13,3 persen (2006) menjadi 8,4 persen (2007). Salah satu penyebabnya adalah turunnya tingkat *lifting* produksi terutama dari kilang-kilang minyak tua.

Cadangan devisa Indonesia naik dari USD42,6 miliar pada tahun 2006 menjadi USD56,9 miliar pada 2007, bahkan pada Maret 2008 telah mencapai USD60 miliar.

9. Berapa besar penerimaan negara saat ini?

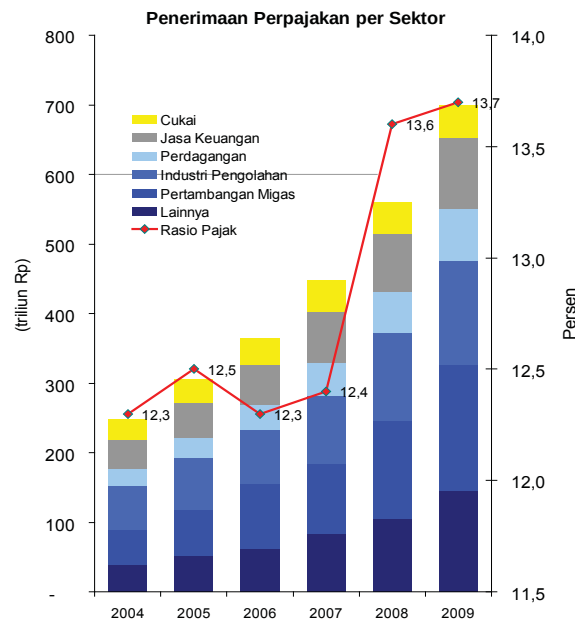
Penerimaan negara diperoleh dari penerimaan dalam negeri yang terdiri dari penerimaan perpajakan, PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan hibah.

Realisasi penerimaan Negara dan hibah tahun 2007 menunjukkan perkembangan yang lebih baik dari tahun 2006 yang secara nominal naik dari Rp637.987,2 miliar pada 2006 menjadi Rp711.9087 miliar pada 2007.

Tetapi kontribusinya per PDB (Produk Domestik Bruto) mengalami penurunan dari 19,1 persen PDB pada 2006 menjadi 18,7 persen PDB di tahun 2007.

10. Bagaimana dengan sektor perpajakan dan PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak)?

Secara absolut, penerimaan perpajakan tahun 2007



terrealisasi sebesar Rp491.203,0 miliar dengan rincian, (1) Penerimaan PPh sebesar Rp238.770,0 miliar yang terdiri dari PPh migas sebesar Rp44.006,7 miliar dan PPh nonmigas sebesar Rp194.735,6 miliar; (2) Penerimaan PPN sebesar Rp155.007,3 miliar; (3) penerimaan PBB sebesar Rp23.619,1 miliar (4) Penerimaan PBHTB (Pajak Perolehan Bea Hak Tanah dan Bangunan) sebesar Rp5.935,7 miliar; dan (5) Penerimaan pajak lainnya sebesar Rp2.743,3 miliar.

Dari sisi penerimaan kepabeanan dan cukai secara total meningkat cukup signifikan. Penerimaan bea masuk 2006 dan 2007 masing-masing sebesar Rp12.140,4 dan Rp16.690,7 miliar. Sementara itu, penerimaan cukai meningkat dari Rp37.772,1 miliar pada 2006 menjadi Rp44.680,7 miliar pada 2007.

11. Bagaimana peran Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB)?

Peran LKNB semakin meningkat yang dicerminkan oleh peningkatan rasio nilai aset LKNB terhadap PDB, dari sekitar 9,9 persen (2003) menjadi sekitar 11 persen pada akhir tahun 2006 serta tersedianya mekanisme perlindungan nasabah/investor lembaga jasa keuan-

gan.

Jenis-jenis lembaga keuangan non-bank meliputi

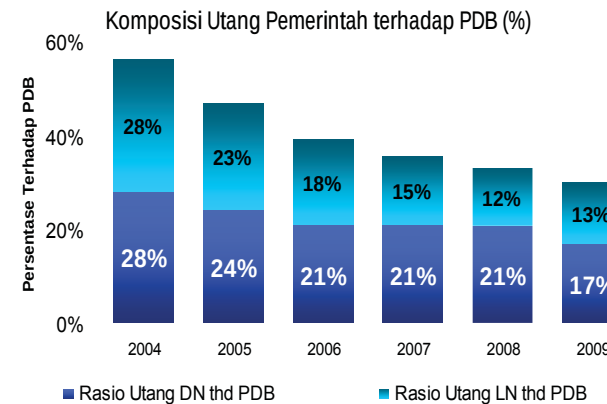
- (1) Lembaga pembiayaan pembangunan,
- (2) Lembaga perantara penerbit dan perdagangan surat-surat berharga, contoh PT. Danareksa.
- (3) Lembaga keuangan lain seperti:
 - a. Perusahaan asuransi yaitu perusahaan pertanggungan sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Undang-Undang Hukum Perniagaan ayat 246.
 - b. PT. Pegadaian yaitu perusahaan milik pemerintah yang ditugasi untuk membantu rakyat, meminjamkan uang secara perorangan dengan menjaminkan barang-barang bergerak maupun tak bergerak.
 - c. Koperasi kredit yaitu sejenis koperasi yang kegiatan usahanya adalah mengumpulkan dana anggota melalui simpanan dan menyalurkan kepada anggota yang membutuhkan dana dengan cara pemberian kredit..

Sedangkan yang bersifat non bank adalah koperasi simpan pinjam (KSP), lembaga dana kredit pedesaan (LDKP), baitul mal wattamwil (BMT), lembaga swadaya

masyarakat (LSM), arisan, pola pembiayaan Grameen, pola pembiayaan ASA, kelompok swadaya masyarakat (KSM), *credit union*, dan lainnya.

12. Bagaimana komposisi utang pemerintah?

Dengan menurunnya resiko ekonomi makro, terjadi



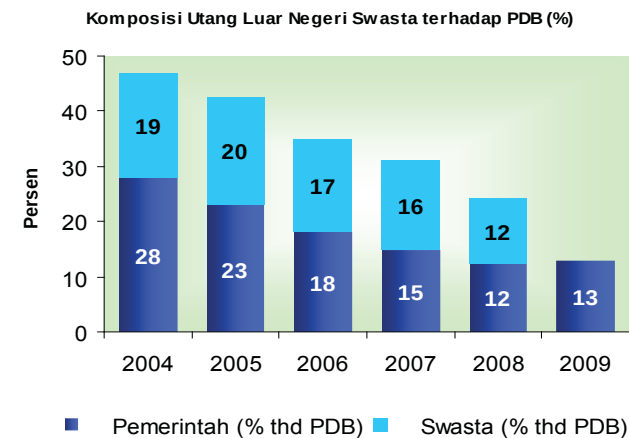
juga penurunan rasio utang luar negeri terhadap PDB pada tahun 2006 sebesar 18 persen. Tahun 2007 menjadi 15 persen dan tahun 2008 menjadi 12 persen. Sedangkan rasio utang dalam negeri terhadap PDB relatif stabil dengan jumlah 21 persen.

Menurut Bank Dunia komposisi utang Indonesia mengalami pergeseran dimana beberapa tahun sebelumnya utang Indonesia didominasi oleh utang luar negeri.

Tahun 2006 rasio utang terhadap PDB sudah mencapai 39%, dan pada 2007 rasio tersebut sebesar 35,8%. Padahal, penurunan rasio tersebut disebabkan laju peningkatan PDB lebih besar ketimbang menurunnya utang. Penurunan itu juga disebabkan oleh upaya pemerintah menerbitkan Obligasi Retail Indonesia (ORI), yang merupakan surat utang negara yang khusus dimaksudkan untuk warga negara Indonesia, untuk membiayai defisit APBN.

13. Bagaimana komposisi utang swasta?

Komposisi utang luar negeri swasta terhadap PDB mengalami penurunan pada tahun 2006 sejumlah 17 persen, tahun 2007 kembali menurun menjadi 16 pers-



en dan tahun 2008 menjadi 12 persen.

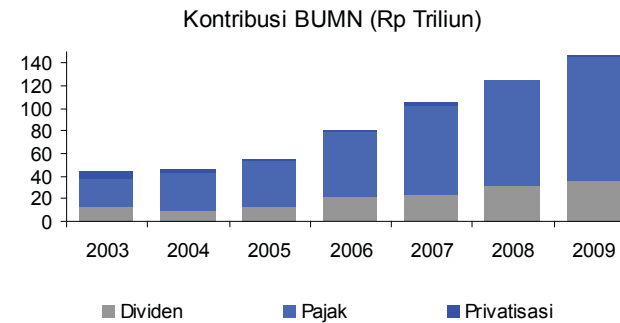
Hal tersebut didorong oleh peningkatan kegiatan ekonomi domestik, membaiknya iklim investasi, selisih suku bunga yang menarik, dan kestabilan makroekonomi yang terjaga.

Kenaikan penempatan aset di luar negeri oleh swasta domestik dalam jumlah yang juga signifikan, baik berupa investasi langsung maupun pembelian surat berharga juga disebut sebagai salah satu faktor pendorong. Hal ini adalah cerminan meningkatnya minat dan kemampuan investor domestik untuk melakukan ekspansi usaha di luar negeri.

14. Bagaimana kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara?

Kontribusi BUMN dari segi dividen dan pajak meningkat dari tahun 2006 ke tahun 2008. Pemerintah menargetkan laba dari seluruh BUMN mencapai Rp 63,84 triliun, naik dibandingkan laba BUMN pada 2006 sebesar Rp 54,4 triliun. Pada tahun anggaran 2006, pemerintah menargetkan setoran dividen BUMN sebesar Rp 21,4 triliun.

Pada tahun 2006, jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencapai 139 perusahaan. Di tahun 2007, jumlah BUMN akan dikurangi menjadi 102 perusahaan. Selanjutnya, pada tahun 2008, jumlah BUMN akan dikurangi lagi menjadi tinggal 87 perusahaan. Upaya penyehatan BUMN melalui merger tersebut akan terus



dilakukan hingga akhir 2015 dan diharapkan hanya tinggal 25 perusahaan yang sehat.

15. Bagaimana dengan kesempatan kerja di Indonesia?

Dari tahun ke tahun kesempatan kerja yang tercipta semakin meningkat. Bila pada tahun 2004 kesempatan kerja yang tersedia sebesar 0,91 juta, pada tahun 2005 telah ada 1,5 juta kesempatan kerja. Tahun 2006

kesempatan kerja yang ada menjadi 2,4 juta dan pada tahun 2007 meningkat lagi menjadi 4,4 juta kesempatan kerja.

Dengan terus meningkatnya penciptaan kesempatan kerja dari tahun ke tahun, tentu saja angka pengangguran pun bergerak turun.

Jika pada awalnya angka pengangguran mencapai 11,93 juta orang atau 10,28 persen dari total angkatan kerja pada Agustus 2006, angka tersebut turun menjadi 10,54 juta orang atau 9,50 persen dari total angkatan kerja pada Februari 2007.

Tren itu berlanjut hingga akhir 2007, dimana angka pengangguran turun menjadi sebesar 10,01 juta orang atau 9,11 persen dari total angkatan kerja.

16. Bagaimana dengan penciptaan kesempatan kerja?

Selama 2005 - 2007, jumlah lapangan kerja meningkat sekitar 6 juta. Kesempatan kerja pada sektor industri di perkotaan mengalami penurunan 229.000, akan tetapi di pedesaan meningkat sebesar 1,4 juta.

Pada sektor pertanian di perkotaan, kesempatan kerja mengalami sedikit penurunan sekitar 211.000. Se-

baliknya, di pedesaan bertambah 107.000. Dari sektor produksi, pertumbuhan lapangan kerja didominasi oleh sektor jasa yang berkontribusi sekitar 2,7 juta di perkotaan dan 2,2 juta di pedesaan.

Peningkatan lapangan kerja ini telah berhasil menurunkan angka pengangguran terbuka. Penciptaan lapangan kerja produktif diupayakan secara terus menerus dan konsisten agar pengangguran terbuka semakin berkurang untuk mencapai target sebesar 5,1 persen pada tahun 2009.

17. Bagaimana dengan sektor UMKM?

Rata-rata laju pertumbuhan kelompok usaha di Indonesia tumbuh diatas 6% pada tahun 2007. Pertumbuhan tertinggi adalah kelompok Usaha Menengah sekitar 6,84%, sementara untuk sektor UKM tumbuh sekitar 6,38%. Pertumbuhan tertinggi pada sektor UKM terjadi pada sektor bangunan 9,3%, sektor perdagangan, hotel dan restoran 8,5% dan sektor pertambangan dan penggalan 7,8%.

Pada tahun 2007 jumlah populasi UKM mencapai 48,7 juta unit usaha atau 99,99% terhadap total unit usaha di Indonesia yang berjumlah 49,845 juta unit usa-



Jumlah Unit Usaha dan Tenaga Kerja UKM dan Usaha Besar (UB)				
Uraian	2006		2007	
	UKM	UB	UKM	UB
Unit Usaha (Unit)	48.779.151	4.398	49.840.489	4.527
Tenaga Kerja (orang)	89.547.762	2.445.595	91.752.318	2.520.707

keterangan : UKM Usaha Kecil Menengah
UB Usaha Besar

Sumber : BPS

ha. Sementara jumlah tenaga kerjanya mencapai 91,8 juta orang atau 97,3% terhadap seluruh tenaga kerja Indonesia yang berjumlah 94,3 juta pekerja.

18. Apa kontribusi sektor UMKM terhadap penerimaan negara?

Porsi ekspor UKM pada tahun 2007 sebesar 20,02% dari total ekspor non-migas Indonesia, sedangkan ekspor Usaha Besar (UB) masih menjadi dominasi utama bagi ekspor non-migas Indonesia sebesar 79,98%. Ek-

spor Non-migas bagi UKM masih didominasi oleh sektor industri 89%, sedangkan sektor pertanian sekitar 9,8%.

Baik sektor UKM maupun Usaha Besar (UB), sektor industri masih menyumbang terbesar dalam ekspor non-migas Indonesia.

TANYA
JAWAB

MEMAHAMI KRISIS KEUANGAN GLOBAL

31





32



BAB IV
DAMPAK KRISIS KEUANGAN GLOBAL
TERHADAP INDONESIA

1. **Apakah dampak krisis ekonomi Amerika Serikat di Indonesia?**

Krisis ekonomi di AS mengakibatkan pengeringan likuiditas sektor perbankan dan insitusi keuangan non-bank yang disertai berkurangnya transaksi di sektor keuangan.

Pengeringan likuiditas akan memaksa para investor dari institusi keuangan AS untuk melepas kepemilikan saham mereka di pasar modal Indonesia untuk memperkuat likuiditas keuangan institusi mereka.

Aksi tersebut akan menjatuhkan nilai saham dan mengurangi volume penjualan saham di pasar modal Indonesia. Selain itu, beberapa perusahaan keuangan Indonesia yang menginvestasikan dananya di instrumen investasi institusi-institusi keuangan di AS tersebut juga mendapat imbas krisis ekonomi AS.

Krisis ekonomi di AS yang merambah ke beberapa negara lainnya akan mengancam perdagangan beberapa produk Indonesia yang di ekspor ke AS, Jepang dan kawasan Uni Eropa yang telah berlangsung sejak lama. Hal itu sangat berbahaya mengingat produk ekspor Indonesia sangat bergantung pada negara-negara

tersebut, sedangkan di dalam negeri produk yang sama kalah bersaing dengan produk impor China yang lebih murah.

2. **Apakah krisis ekonomi saat ini sama dengan krisis ekonomi Indonesia tahun 1997/1998?**

Tidak sama. Krisis ekonomi Amerika Serikat yang dikhawatirkan berdampak pada ekonomi Indonesia diyakini tidak sama dengan krisis ekonomi 1997/1998.

3. **Apa alasannya?**

Ketidaksamaan tersebut ditunjukkan oleh indikator berikut :

- 1) Berbagai indikator moneter, perbankan dan makro ekonomi Indonesia saat ini menunjukkan ketahanan relatif lebih baik dibandingkan dengan negara lain, kecuali indeks saham.
- 2) Bapepam juga telah melarang *short selling* (tindakan meminjam saham dan membelinya saat harga jatuh) yang biasa dilakukan *trader* jangka pendek seperti *hedge fund* asing.
- 3) Faktor-faktor utama penyebab krisis 1997/1998 adalah kepanikan pasar, inkonsistensi kebijakan



dan kestabilan pemerintahan, korupsi, jatuhnya harga minyak dunia sampai USD20 dolar per barel yang mengakibatkan turunnya tingkat permintaan, investasi publik dan swasta serta pendapatan riil. Namun, faktor-faktor tersebut tidak terdapat pada tahun ini.

- Kondisi sosial politik relatif stabil, tidak ada konflik yang berkepanjangan. Sementara upaya penegakan terus dilakukan dengan serius dan berkelanjutan.

Dampak yang mungkin terjadi adalah :

1) Dampak langsung

Kerugian langsung dialami beberapa korporasi di Indonesia yang berinvestasi di institusi-institusi keuangan Amerika Serikat bermasalah, misalnya lembaga keuangan yang menanam dana dalam instrumen keuangan **Lehman Brothers**.

2) Dampak tidak langsung

- Pengaruh terhadap momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah pengeringan likuiditas, lonjakan suku bunga, anjloknya harga komoditas dan melemahnya pertumbuhan sum-

ber dana.

- Menurunnya tingkat kepercayaan konsumen, investor dan pasar terhadap berbagai institusi keuangan yang ada.
- *Flight to quality*, pasar modal Indonesia terjun bebas dengan indikasi melemahnya mata uang rupiah, dan yang paling mengkhawatirkan adalah apabila para investor yang saat ini masih memegang aset keuangan likuid di Indonesia mulai melepas aset-aset tersebut karena alasan *flight to quality*.
- Kurangnya pasokan likuiditas di sektor keuangan karena kebangkrutan berbagai institusi keuangan global khususnya bank-bank investasi akan berdampak pada *cash flow sustainability* perusahaan-perusahaan korporasi besar di Indonesia, sehingga pendanaan ke *capital market* dan perbankan global akan mengalami kendala dari sisi *pricing* (suku bunga) dan *availability* (ketersediaan dana)
- Menurunnya tingkat permintaan dan harga komoditas-komoditas utama ekspor Indonesia tanpa diimbangi peredaman laju impor secara

signifikan akan menyebabkan defisit perdagangan (*trade deficit*) yang semakin melebar dalam jangka menengah ke depan.

- Selanjutnya defisit perdagangan tersebut akan menyulitkan penggalangan *capital inflow* dalam jumlah besar untuk menutup defisit itu sendiri seiring dengan keringnya likuiditas pasar keuangan global.



BAB V
KEBIJAKAN INDONESIA
MENGHADAPI DAMPAK KRISIS KEUANGAN GLOBAL

1. ***Apa yang dapat dilakukan untuk menekan dampak krisis keuangan global?***

Berkaitan dengan terjadinya krisis keuangan di AS, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memberikan 10 Arahan (Direktif Presiden RI) untuk Menekan Dampak Krisis Ekonomi AS. Arahan tersebut ditujukan untuk memelihara pertumbuhan ekonomi serta menyelamatkan perekonomian Indonesia dari krisis keuangan global.

2. ***Apa maksud Arahan Presiden tersebut?***

Arahan tersebut diberikan untuk memelihara momentum kebangkitan perekonomian nasional dan mengelola dampak krisis keuangan global, agar tidak mengancam pertumbuhan perekonomian Indonesia.

3. ***Apa saja arahan Presiden tersebut?***

Arahan/Direktif Presiden untuk menekan (meminimalkan) Dampak Krisis Ekonomi Amerika Serikat tersebut ada sepuluh, yaitu :

1. Semua kalangan harus tetap optimis, dan bersinergi dalam menghadapi krisis tersebut untuk memelihara momentum pertumbuhan dan mengelola serta men-

gatasi dampak krisis. Kita tidak perlu panik, tetapi harus tetap menjaga kepercayaan masyarakat.

2. Dengan kebijakan dan tindakan yang tepat, kerja keras dan upaya maksimal, semua pihak tetap mempertahankan nilai pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen. Untuk itu, pemerintah terus menjaga konsumsi, pembelanjaan pemerintah, investasi, ekspor dan impor. Belajar dari krisis 1998, pemerintah akan terus mendorong perekonomian perekonomian domestik yakni sektor UMKM, pertanian, dan sektor informasi.
3. Optimasi APBN 2009 untuk memacu pertumbuhan dan membangun *social safety net* dengan memperhatikan sejumlah hal antara lain:
 - a. Alokasi untuk pembangunan infrastruktur dan stimulasi pertumbuhan lainnya (*growth and employment*).
 - b. Alokasi penanggulangan kemiskinan dengan empati kepada kaum miskin dan program 3 klaster.
 - c. Defisit anggaran harus tepat dan rasional, tidak mengganggu pencapaian “sasaran kembar” (*growth with equity*) dan tetap dapat dibiayai/ditutup seimbang dalam situasi keuangan global

- dewasa ini.
- d. Tetap melakukan efisiensi serta pembatasan pada pembelajaan yang konsumtif dan yang dapat ditunda.
 4. Dunia usaha khususnya sektor riil harus tetap bergerak meskipun ekspansi bisa berkurang akibat krisis. Bank Indonesia (BI) dan jajaran perbankan harus mengembangkan kebijakan agar kredit dan likuiditas senantiasa tersedia. Sementara, pemerintah mengeluarkan kebijakan regulasi iklim dan insentif. Adapun, pihak swasta harus lebih adaptif dan terus mempertahankan kinerja, tetap mencari peluang dan *share the hardship*.
 5. Semua pihak diharapkan agar cerdas menangkap peluang (*opportunity*) untuk melakukan persaingan dan kerjasama ekonomi lain dengan negara-negara sahabat.
Diperkirakan Ekonomi Asia, terutama RRC akan tetap baik. Kondisi pasar di Amerika dan Eropa saat ini akan lebih tertutup dan melemah untuk menerima ekspor produk Indonesia. Oleh karena itu diperlukan inovasi produk yang lebih kompetitif.
 6. Menggalakkan kembali penggunaan dan konsumsi

produk dalam negeri sehingga pasar domestik akan bertambah kuat.

Hal tersebut penting agar netto ekspor-impor tetap positif, neraca pembayaran (BOP) tidak terancam defisit serta akan memperkuat dan menambahkan pasar domestik.

Menteri terkait diimbau untuk memberikan insentif/disinsentif agar masyarakat Indonesia tetap menggunakan produksi dalam negeri. Upaya tersebut yang ditujukan untuk mencegah *dumping* barang luar negeri belok ke pasar dalam negeri. Presiden menginstruksikan kepada jajaran pemerintah agar dalam *procurement* lebih mengutamakan produk industri nasional.

7. Saling memperkuat sinergi dan kemitraan atau *partnership* antara Pemerintah, Bank Indonesia dan jajaran perbankan serta swasta atau dunia usaha. Cegah dan hilangkan *mistrust* dan *prejudice*. Semua pihak berperan penting yaitu pemerintah memerlukan penerimaan (*revenue*) untuk membiayai pembangunan, swasta/Bisnis menciptakan lapangan kerja dan menghasilkan pajak dan Bank Indonesia dan perbankan dengan kebijakan moneter, menda-

nai sektor riil dan mengelola inflasi.

Presiden berharap, jika ada masalah, hendaknya dipecahkan dengan baik dan menghindari tindakan yang bersifat unilateral sepanjang tidak melanggar hukum.

8. Semua kalangan diminta menghindari sikap egosektoral, perilaku *"business as usual"*, dan memandang remeh masalah yang dihadapi. Presiden menegaskan pentingnya bekerjasama/berkoordinasi antar instansi terkait sebab betapapun penting dan kuatnya sebuah institusi tidak akan pernah bisa bekerja sendiri.
9. Berkaitan dengan tahun politik 2008 dan tahun pemilu 2009, Presiden meminta semua kalangan agar tidak melakukan langkah non partisan dalam menghadapi dan mengatasi dampak krisis keuangan global ini. Pemerintah, Bank Indonesia, DPR, DPD, Dunia Usaha, dan pelaku lainnya diharapkan dapat berperan positif dan konstruktif.
10. Semua pihak diminta melakukan komunikasi dengan tepat dan bijak kepada rakyat dengan informasi yang jujur dan tidak membuat pernyataan yang membuat masyarakat panik. Presiden menegaskan

pentinnya peran pers dan media massa untuk menyebarkan informasi yang tepat dan bijak.

4. Mengacu pada krisis ekonomi tahun 1998, apa langkah-langkah prioritas yang dilakukan pemerintah?

Langkah-langkah prioritas yang dilakukan adalah:

1. Mengutamakan proteksi rakyat kecil. Memastikan kebutuhan sehari-hari, biaya kesehatan, pendidikan dan layanan publik lainnya tidak mengalami gangguan.
2. Memastikan sektor riil terus bergerak. Pemerintah terus memelihara komunikasi dengan dunia usaha. Selain itu, Bank Indonesia, dan jajaran perbankan juga memastikan agar ada likuiditas, ketersediaan kredit dan lain-lain, untuk menjaga sektor riil.
3. Terkait gonjang-ganjing pasar saham dan fiskal, banyak hal yang berada di luar jangkauan pemerintah karena harus tunduk pada hukum global.

5. Apa upaya pemerintah pada sektor riil agar perekonomian tetap stabil?



Langkah kebijakan pemerintah untuk menjaga agar perekonomian tetap stabil di tengah krisis adalah :

1. Mendorong percepatan belanja pemerintah dan penyerapan anggaran dengan merevisi Keppres Nomor 80 Tahun 2003 untuk mempercepat proses pengadaan barang/jasa pemerintah.
2. Mendorong kinerja sektor riil dengan insentif dan disinsentif dalam berbagai bentuk, contohnya kemudahan perijinan hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan.
3. Tetap berupaya menarik penanaman modal dari luar negeri dengan memperbaiki beberapa masalah yang dikeluhkan investor untuk mengendalikan impor untuk jenis barang konsumtif, dengan meningkatkan pengadaan dalam negeri.
4. Mengantisipasi adanya proteksi perdagangan tiap-tiap negara yang berpotensi menguatnya perlindungan terhadap produk dalam negerinya, antara lain dengan mempersiapkan diri apabila ada tuduhan *dumping*.
5. Meningkatkan pengamanan pasar domestik dari produk impor ilegal dan produk impor yang legal tetapi dilatari *dumping*. Pembatasan laju impor

diambil untuk melindungi industri dalam negeri dari membanjirnya produk luar negeri.

6. Dari segi daya beli masyarakat, pemerintah mendorong laju penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan perpanjangan pemberian bantuan program-program pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan pengangguran, antara lain: Bantuan Langsung Tunai, penyaluran Beras untuk Rakyat Miskin, Bantuan Operasional Sekolah, Program Keluarga Harapan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, Kredit Usaha Rakyat, Revitalisasi Modal Ventura.

6. Apa insentif yang diberikan pemerintah untuk mendorong kinerja sektor riil?

Pemerintah akan menerapkan insentif ekspor berupa perbaikan iklim dan pengurangan biaya transaksi ekspor. Kebijakan ini dibuat untuk mencegah imbas krisis keuangan global.

Selain itu pemerintah juga akan merestitusi pajak penjualan dan bea masuk termasuk strategi ekspansi ke pasar baru dan mengamankan dari produk ilegal.

7. Apa yang dilakukan pemerintah untuk mempertahankan neraca ekspor?

Untuk tetap mempertahankan neraca ekspor, pemerintah akan mengalihkan ekspor yang tidak terserap di AS ke sejumlah negara yang tidak terkena imbas krisis keuangan, antara lain negara-negara Asia, seperti RRC, Korea, Taiwan, dan India.

8. Selain negara-negara di kawasan Asia, negara mana lagi yang dituju?

Selain negara-negara di kawasan Asia, pemerintah berencana menembus pasar baru yang masih memiliki kekayaan alam dan tidak terlalu kena dampak krisis global, antara lain Brasil (Amerika Latin), Timur Tengah, dan Rusia.

Khusus untuk Brasil, produk yang ditawarkan adalah barang-barang konsumsi, bangunan, dan juga beberapa produk pertanian seperti karet.

Sementara, untuk Timur Tengah karena sedang ada pembangunan besar-besaran maka barang yang ditawarkan adalah bahan bangunan, cendera mata, peralatan, bahkan barang-barang konsumsi.

9. Untuk meningkatkan devisa negara, sektor apa saja yang masih mungkin ditingkatkan?

Ada dua sektor devisa yang memiliki tingkat devisa tinggi, yaitu sektor pariwisata dan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Sejauh ini kedua sektor ini masing-masing menyumbang penerimaan devisa sebesar USD 6 miliar per tahun.

10. Apa upaya pemerintah di sektor moneter?

Pemerintah, dalam hal ini melalui BI akan menempuh beberapa langkah, yaitu memperkuat likuiditas sektor perbankan, menjaga pertumbuhan kredit pada tingkat yang sesuai untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan terkait kebijakan neraca pembayaran. Upaya tersebut adalah :

- Antisipasi dari pengeringan likuiditas global dengan memperkuat sektor perbankan, pertumbuhan kredit dijaga pada level yang tetap mampu mendukung pertumbuhan ekonomi.
- Mencari pembiayaan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara dari sumber non pasar, seperti sumber-sumber bilateral maupun multilateral pertumbuhan ekonomi.



- Memantau neraca pembayaran dengan menjaga momentum arus modal ke dalam negeri.
- Memantau penggunaan anggaran kementerian dan lembaga negara

11. Mengapa pemerintah mencegah terjadinya “rush” (penarikan tabungan di bank secara besar-besaran)?

Bila nasabah menarik dana mereka secara besar-besaran, maka perbankan akan kehilangan likuiditasnya dan terancam bangkrut karena tidak bisa membayar kewajibannya, dan apabila hal ini terjadi akan mempengaruhi kondisi fundamental perekonomian negara

12. Bagaimana upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya “rush”?

Pemerintah meningkatkan penjaminan simpanan nasabah di bank yang sebelumnya hanya Rp100juta menjadi Rp2miliar, untuk menarik kepercayaan masyarakat atas keamanan dana mereka di bank.

13. Upaya hukum apa yang dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi dampak krisis keuangan

global?

Bank Indonesia dan Pemerintah (termasuk peranan lembaga penjaminan simpanan) memperkuat protokol implementasi *financial safety net* dan peran *lender of the last resort* dengan tetap memperhatikan aspek *governance*, sehingga terdapat mekanisme yang semakin tajam apabila terjadi krisis likuiditas perbankan dan obligasi.

Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah mendorong percepatan pembahasan RUU *Financial Safety Net*. Selain itu, pemerintah mengeluarkan Perppu Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang BI dan Perppu tentang Perubahan Atas UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang LPS.

14. Apa sebenarnya yang dibahas dalam RUU “Financial Safety Net” tersebut?

Rancangan Undang-Undang *Financial Safety Net* atau Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK) merupakan suatu dasar hukum untuk mengantisipasi ketahanan sistem keuangan.

RUU Jaring Pengaman Sektor Keuangan merupakan payung hukum bagi otoritas, pemerintah dan Bank

Indonesia, ketika harus mengambil tindakan emergency dalam rangka menyelamatkan perekonomian nasional. Saat ini draft Rancangan Undang-Undang JPSK sedang disiapkan oleh BI dan pemerintah.

Keperluan dibentuk *financial safety net*, yaitu, agar jelas tata cara pengambilan keputusan mengenai kesulitan keuangan bank yang berdampak sistemik serta pemberian fasilitas pembiayaan darurat bersumber pada pendanaan yang berasal dari APBN.

15. Apakah ada kebijakan moneter lainnya?

Terkait dengan pengeringan likuiditas di pasar keuangan dan perbankan, Bank Indonesia menyederhanakan aturan Giro Wajib Minimum (GWM) untuk menambah kepercayaan diri bank terhadap kondisi likuiditas perbankan yang melemah akibat krisis keuangan global.

Giro Wajib Minimum (*statutory reserve*), atau yang selanjutnya disebut GWM, adalah simpanan minimum yang harus dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari Dana Pihak Ketiga Bank (DPK).

Langkah lain yang ditempuh BI, diantaranya adalah

membuka ruang untuk *repo* Surat Utang Negara (SUN) atau SBI yang diperpanjang masa berlakunya hingga tiga bulan. BI menurunkan setoran Giro Wajib Minimum (GWM) perbankan, dari total 9,08 persen menjadi 7,5 persen.

16. Apakah konsep bank syariah mampu sebagai alternatif pemecah masalah ?

Bank syariah berpedoman pada hukum Islam dimana Bank syariah tidak menerapkan pemberian bunga baik bunga pinjaman maupun bunga tabungan, melainkan menerapkan sistem bagi hasil atas penggunaan dana yang disimpan ataupun dipinjamkan.

Beberapa prinsip/hukum yang dianut oleh system perbankan syariah antara lain:

- Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai yang telah ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan.
- Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana.



- Islam tidak memperbolehkan “menghasilkan uang dari uang”. Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik.
- Unsur *Gharar* (spekulasi/ketidakpastian) tidak diperkenankan. Kedua pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan di dapat maupun resiko yang harus ditanggung.

Dengan menganut prinsip-prinsip di atas menjadikan bank syariah tidak “bermain” di tataran jual beli surat berharga, ataupun spekulasi pasar modal sehingga ketika terjadi krisis keuangan yang mengguncangkan bursa saham, keberadaan bank syariah relatif lebih aman.

17. Apa langkah yang dilakukan pemerintah untuk menstabilkan, menenangkan dan mengamankan pasar modal?

- Dihapuskannya aturan *market to market* untuk surat utang yang dimiliki perbankan. Aturan ini sudah disepakati dengan IAI (Ikatan Akuntan Indonesia), diharapkan dengan ini akan membantu bank untuk

mengurus portofolio surat utangnya.

- Pelonggaran aturan yang berkait dengan aturan *buy back* oleh seluruh emiten di bursa.
- Menambah likuiditas melalui belanja Kementrian dan Lembaga, pemerintah akan mengoperasikan APBN untuk menambah likuiditas di pasar dengan cara mendorong belanja.
- Pembelian saham BUMN yang terkoreksi tajam padahal fundamentalnya baik melalui Pusat Intervensi Pemerintah (PIP) Departemen Keuangan.
- Penegakan hukum oleh Bapepan dan SRO terhadap pelaku pasar yang telah melanggar aturan.

18. Apakah penutupan sementara bursa saham merupakan antisipasi yang tepat?

Ya, Bursa Efek Indonesia menghentikan sementara perdagangan (suspensi) seluruh saham dan derivatif beberapa waktu yang lalu karena penurunan harga saham gabungan sudah berada diluar batas kewajaran. Hal itu dikarenakan indeks harga saham gabungan (IHSG) anjlok hingga 168,052 point (turun 10,38 persen).

Suspensi itu dilakukan agar pasar bisa mencer-

na informasi dengan lebih tenang dan rasional serta menghindari kepanikan pasar. Keputusan tersebut untuk mengamankan pasar modal dalam negeri.

19. Antisipasi apa yang perlu pemerintah lakukan untuk meminimalkan dampak krisis keuangan global?

Pemerintah perlu mengantisipasi dampak krisis dengan menekankan pada pentingnya mempercepat reformasi ekonomi yang mendesak untuk dilakukan.

Reformasi tersebut dalam hal percepatan perbaikan iklim investasi, perbaikan sarana dan prasarana, serta percepatan pengadaan listrik. Apabila hal ini telah dilakukan, arus dana yang mengering dari bursa saham dan bursa uang dapat dikompensasikan dengan arus masuk dari penanaman modal langsung.

20. Mengapa pemerintah mengeluarkan Perpu No. 2, 3, dan 4 Tahun 2008?

Belajar dari persetujuan paket penyehatan sektor keuangan di AS, diharapkan agar dilakukan koordinasi antara lembaga eksekutif dan legislatif sedini mungkin, sehingga dalam situasi darurat dapat di maklumi,

bahwa eksekutif akan mengambil langkah-langkah kontigensi yang dibutuhkan melalui penerbitan Perpu.

Perpu tersebut dikeluarkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Bagaimanapun krisis keuangan global yang dapat mempengaruhi stabilitas sistem keuangan di beberapa negara, termasuk Indonesia. Perpu ini juga dimaksudkan sebagai usaha pemerintah membendung dampak krisis keuangan Amerika Serikat dengan memelihara stabilitas sistem keuangan.

21. Apakah isi penting dari Perpu No. 2 Tahun 2008?

Perpu No 2/2008 berisi tentang Perubahan Kedua UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Aspek penting dari perubahan kedua ini adalah Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek.

Bank yang bersangkutan dengan ketentuan bank tersebut wajib memberikan agunan yang berkualitas tinggi yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau

pembiayaan yang diterimanya.

Perpu ini juga menyatakan Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat dengan beban pendanaan dari pemerintah terhadap bank yang mengalami kesulitan keuangan dan berdampak sistemik serta berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan.

22. Bagaimana dengan Perpu No. 3 Tahun 2008?

Perpu No 3/2008 mengatur kriteria-kriteria yang harus dipenuhi agar dapat mengubah nilai simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 11 UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

23. Apakah isi penting Perpu No. 4 Tahun 2008 ?

Perpu No 4/2008 berisi tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). JPSK merupakan suatu mekanisme pengamanan sistem keuangan dari ancaman krisis yang mencakup pencegahan dan penanganan krisis.

Secara umum JPSK ditujukan untuk menciptakan dan memelihara stabilitas sistem keuangan melalui

pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan dan sistem pembayaran, penyediaan fasilitas pembiayaan jangka pendek, program penjaminan simpanan, serta pencegahan dan penanganan krisis.

Namun demikian, mengingat pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan telah diatur dalam Undang-Undang terkait dengan Lembaga Keuangan, pengaturan tentang sistem pembayaran dan penyediaan fasilitas pembiayaan jangka pendek telah diatur dalam UU BI dan Perpu BI, serta program penjaminan simpanan telah diatur dalam UU LPS dan Perpu LPS, maka ruang lingkup Perpu ini hanya meliputi tindakan pencegahan dan penanganan Krisis.

Tindakan pencegahan dan penanganan krisis tersebut meliputi :

1. penanganan kesulitan likuiditas dan/atau masalah solvabilitas bank yang berdampak sistemik; dan
2. penanganan kesulitan likuiditas dan/atau masalah solvabilitas lembaga keuangan bukan bank (LKBB) yang berdampak sistemik.

Adapun instrumen-instrumen yang dipakai disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat ancaman terhadap



sistem keuangan: berupa pemberian fasilitas pembiayaan darurat dan penambahan modal melalui penyer-taan modal sementara.

Jika sebuah bank mendapatkan fasilitas pembiayaan darurat, Bank Indonesia berwenang untuk mengambil alih hak dan wewenang RUPS untuk mengganti pengu-rus bank dan menempatkan bank bersangkutan dalam status pengawasan khusus.

Apabila sebuah bank mendapatkan penyertaan modal sementara, maka bank dimaksud sepenuhnya diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atau Badan Khusus yang dibentuk pemerintah seba-gaimana dimaksud dalam Pasal 37A Undang-Undang tentang Perbankan.

Untuk mengurangi biaya krisis yang akan ditang-gung oleh negara, pemerintah juga dapat memberikan insentif dan/atau fasilitas dalam rangka penyelesaian kesulitan likuiditas dan /atau masalah solvabilitas yang dilakukan oleh sektor privat. Insentif dan fasilitas bisa berupa pemberian insentif fiskal dan relaksasi peraturan perundangan.

Sumber pendanaan pemerintah untuk pencegahan dan penanganan krisis berasal dari anggaran pendapa-

tan dan belanja negara melalui penerbitan Surat Ber-harga Negara (SBN) atau dana tunai. Untuk kebutuhan akuntabilitas, penggunaan dana APBN dalam pencega-han dan penanganan krisis harus mendapat persetu-juan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Berkaitan dengan JPSK, dibentuk pula Komite Sta-bilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang beranggotakan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia yang didukung oleh sekretariat. KSSK bertugas diantaranya untuk menetapkan kebijakan dan langkah-langkah da-lam rangka pencegahan dan penanganan krisis di sek-tor keuangan dan melakukan koordinasi dengan berba-gai otoritas dalam pelaksanaannya.

TANYA
JAWAB

MEMAHAMI KRISIS KEUANGAN GLOBAL

49



DAFTAR ISTILAH



A

Adjustable Rate : Suku bunga penyesuaian

B

Bailout : Dana talangan Pemerintah Amerika Serikat untuk mengatasi krisis finansial.

Barel : Satuan standar yang umum digunakan untuk ukuran minyak, setara dengan 159 liter (1 drum minyak)

bn : billion, istilah miliar jika dalam kurs mata uang rupiah.

C

Cash flow sustainability : Kesenambungan arus uang

Capital market : Terminologi lain untuk pasar modal

Capital inflow : Arus masuk modal investasi.

CPO : Minyak sawit mentah

D

Dana Pihak Ketiga Bank (DPK) : Kewajiban Bank kepada penduduk dan bukan penduduk dalam rupiah dan valuta asing.

Dioriginasi : Penelusuran ulang produk kredit (seperti;KPR).

E

Emerging markets : Pasar yang sedang berkembang.

F

Foreclosed : Barang kredit (seperti, rumah) yang disita oleh bank.

Fund Management : Lembaga investasi.

Flight to quality : Nilai-nilai saham dalam suatu pasar modal yang jatuh akibat faktor-faktor tertentu

Financial Safety Net/Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK) : Merupakan suatu dasar hukum untuk mengantisipasi ketahanan sistem keuangan

G

Giro Wajib Minimum (statutory reserve) : Simpanan minimum yang harus dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari Dana Pihak Ketiga Bank (DPK)

Gelembung-gelembung ekonomi : Perdagangan dengan volume dan harga tinggi yang jauh diatas harga intrinsik.



H			N	
Hedge fund	:	Dana milik institusi atau pemain saham yang digunakan untuk menjalankan strategi agresif dalam bursa saham seperti short selling.	Non Performing Loan (NPL)	: Kredit bermasalah; tingkat pengembalian yang rendah dari peminjam dana
I			O	
Inflation targeting	:	Kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunga apabila inflasi diatas target dan menurunkannya di saat inflasi berada dibawah target	Obligasi	: Suatu pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya kelak pada saat jatuh tempo pembayaran.
Indeks Dow Jones	:	Indeks saham di New York Stock Exchange (Bursa Efek New York, Amerika Serikat)	P	
L			Prime mortgage	: Kredit perumahan yang diberikan kepada nasabah yang layak.
Lifting	:	(Bhs. Inggris) yang berarti peningkatan; Lifting produksi minyak : peningkatan produksi minyak	Portofolio saham	: Kumpulan saham yang dimiliki seorang investor.
Loan to Deposit Ratio (LDR)	:	Perbandingan antara jumlah uang yang masuk/ disimpan ke bank dibandingkan dengan uang yang dikeluarkan bank	PDB	: Product Domestik Bruto
M			Predatory Lending Practice	: Kecurangan dalam penyaluran kredit.
Margin	:	Selisih Harga	PDB (Produk Domestik Bruto)	: Indikator pertumbuhan perekonomian suatu negara dalam kurun waktu tertentu
			PBHTB (Pajak Perolehan Bea Hak Tanah dan Bangunan)	: Salah satu jenis pajak yang biasa dihimpun di daerah atas beban pembiayaan pembelian tanah



Dividen Bagi hasil/pembagian hasil dari keuntungan usaha bagi pemilik modal dan bangunan

R
Rekening Giro : Rekening pihak eksternal tertentu di Bank Indonesia yang merupakan sarana bagi penatausahaan transaksi dari simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat.
Rekapitalisasi : Memberikan modal baru pada suatu perusahaan

S
Sub-prime mortgage : Kredit perumahan yang diberikan kepada nasabah yang kurang layak.
Saham preferen : Adalah bagian saham yang memiliki tambahan hak melebihi saham biasa.
Surat berharga : Mekanisme pembiayaan jangka pendek sehingga banyak perusahaan bisa memperoleh dana untuk operasi sehari-hari
SUN (Surat Utang Negara) : Instrumen keuangan/alat komoditas produksi Bank Indonesia yang dijual ke masyarakat untuk menghimpun dana
Short selling : Strategi spekulasi untuk membeli saham

saat harga rendah dan menjualnya saat harga saham lebih tinggi dalam jangka waktu yang singkat hanya untuk mendapatkan marjin keuntungan.

T
Trade deficit : Defisit perdagangan, perbandingan nilai impor yang lebih besar dengan ekspor
Teaser Rate : Suku bunga promosi.
The Fed : Bank Sentral Amerika Serikat.
Trader : Pelaku investasi di pasar modal

V
Valas: Valuta/mata uang asing

REFERENSI

Erwin Aksa. 2008. Dunia Usaha Indonesia dalam Jaringan Kerjasama Bisnis Global

TANYA
JAWAB

MEMAHAMI KRISIS KEUANGAN GLOBAL

53



Departemen Komunikasi dan Informatika
Badan Informasi Publik
Pusat Informasi Perekonomian
Jalan Medan Merdeka Barat 9 Jakarta 10110
www.depkominfo.go.id

